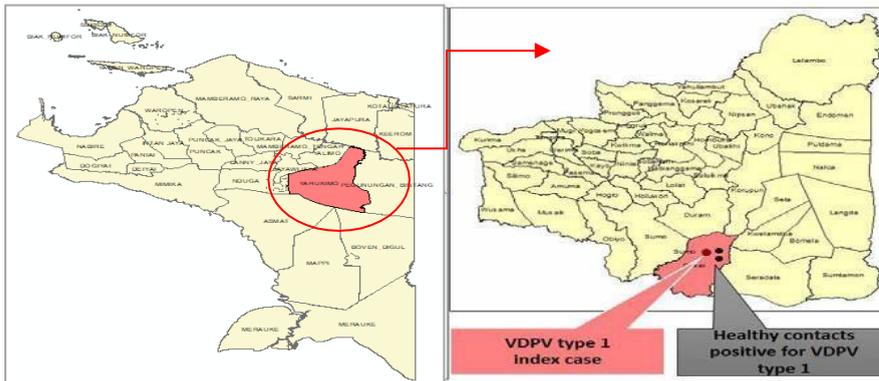


Laporan Situasi KLB cVDPV1 di Indonesia #20

27 Januari 2020

Hanya untuk sirkulasi internal

Kasus cVDPV1 di Provinsi Papua, Indonesia, 2018-2020



Sorotan Mingguan

- Tidak ada transmisi cVDPV1 terhitung 341 hari sejak kasus terakhir terdeteksi.
- Tidak ada kasus baru VDPV yang dilaporkan pada minggu-epi no. 03
- Dokumen rencana tanggap dan keberlanjutan terhadap KLB cVDPV1 fase kedua (Januari - April 2020) telah ditandatangani oleh Dirjen P2P Kemenkes.
- Pertemuan monitoring dan evaluasi terkait kegiatan tanggap KLB Polio di Papua telah dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2020 di Kota Jayapura dipimpin oleh Dirjen P2P. Peserta adalah Dinas Kesehatan Provinsi Papua, KKP Jayapura, WHO, UNICEF dan BTKL Ambon. Pada pertemuan ini mendapatkan kesepakatan dan rencana tindak lanjut untuk mencapai kualitas imunisasi rutin dan surveilans AFP yang tinggi terutama di daerah dataran tinggi.
- Dinas Kesehatan Provinsi Papua memiliki rencana kegiatan untuk melaksanakan pertemuan terkait implementasi *backlog fighting* dan penguatan program imunisasi rutin di tahun 2020 dengan dukungan UNICEF, WHO dan mitra lokal.
- Kegiatan surveilans dan imunisasi telah dilakukan untuk mencegah potensi transmisi dari Filipina dan Malaysia, WHO memindahkan 2 konsultan nasional untuk ditempatkan di provinsi yang berbatasan dengan Filipina yaitu Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Salah satu konsultan nasional juga dipindahkan ke Sulawesi Selatan yang sering dilalui pelayaran internasional. Tujuannya adalah untuk membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas imunisasi rutin dan surveilans AFP.
- Buletin bulanan Imunisasi dan surveilans PD3I di Papua dan Papua Barat 2019 telah dipublikasikan di website WHO pada link <https://www.who.int/indonesia/news>
- Papua memiliki Non Polio AFP rate tahunan di 2019 sebesar **6.44** dengan spesimen adekuat sebesar **59.3 %** sedangkan Papua Barat memiliki Non Polio AFP rate tahunan di 2019 sebesar **7.36** dengan spesimen adekuat sebesar **54.5%**

Ringkasan

Kasus baru cVDPV1 minggu ini: 0

Total kasus cVDPV1:1

Total anak sehat positif dengan VDPV1: 2

Grade KLB: 1

Deteksi terakhir: 13 Feb 2019

Detail Kasus

Jenis Kelamin: Laki-Laki

Usia: 31 bulan

Mulai kelumpuhan: 27 Nov 2018

Status vaksinasi: 0 dosis

Area Terinfeksi

Kecamatan Dekai

Kabupaten Yahukimo

Provinsi Papua

Respons KLB

Di mana: Provinsi Papua dan Papua Barat

Siapa: Semua anak usia 0 sampai kurang dari 15 tahun

Target: 1.26 Juta Anak

Jenis Vaksin: bOPV

Respons Imunisasi

- Sub PIN putaran 1 dan 2 telah selesai dilaksanakan di provinsi Papua Barat. Seluruh (**13 Kabupaten**) melaporkan capaian cakupan yang sama tinggi $\geq 100\%$ (berdasarkan data Pusdatin).
- Sub PIN putaran 1 dan 2 telah selesai dilaksanakan di provinsi Papua. Pada Sub PIN putaran 1 mencapai cakupan sebesar 70.78% dan putaran 2 mencapai cakupan sebesar **87.75%**. **11 dari 29** Kab/Kota pada Sub PIN putaran 1 dan **19 dari 29** Kab/Kota pada putaran 2 mencapai cakupan sebesar $\geq 95\%$ (berdasarkan data Pusdatin per 30 Desember 2019).
- Provinsi Papua Barat telah melakukan **58 RCA** di 13 kabupaten setelah selesainya Sub PIN putaran 2. Sebanyak 2,789 anak berusia 0-15 tahun telah dinilai dan **97,7%** anak yang dinilai telah divaksinasi. Alasan utama anak-anak yang belum divaksinasi di Papua Barat adalah orang tua yang sedang bepergian atau anak-anak yang sakit.
- Di Papua, **185 RCA** telah diselesaikan selama Sub PIN putaran 2 di **11** kabupaten dataran tinggi dan **11** kabupaten dataran rendah. Sebanyak **9,809** anak dinilai dan **90%** dari mereka telah divaksinasi. Di Papua, alasan utama untuk anak yang tidak divaksinasi adalah sedang bepergian, kurangnya informasi tentang kampanye dan anak sedang sakit. Pada akhir Oktober dan November 2019, **141 RCA** tambahan menggunakan formulir baru dilakukan di **21** kabupaten di Papua. Data menunjukkan bahwa **>52%** anak-anak mendapatkan vaksinasi polio di Posyandu dan Puskesmas, **38%**, di Sekolah dan 95% anak yang ditemukan saat RCA, 80% anak-anak yang dinilai telah menerima 2 dosis vaksinasi polio selama Sub PIN putaran 1 dan 2.

Kesiapsiagaan Polio di Provinsi Berisiko Tinggi Lainnya (selain Papua)

Indonesia memiliki dua provinsi yang berbatasan dengan Filipina yaitu Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Sulawesi Selatan juga termasuk karena sering dilalui pelayaran internasional. Kegiatan antisipatif sehubungan dengan potensi transmisi cVDPV2 dari Filipina diantaranya adalah:

- KKP Makassar, provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan koordinasi dengan maskapai Air Asia untuk mengidentifikasi penumpang yang datang dari atau berangkat ke Malaysia. Delapan belas penumpang dari penumpang tersebut telah menerima vaksinasi polio per tanggal 23 Januari 2019.
- Ulasan Rekam Rumah Sakit (HRR) telah dilakukan oleh staf Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Sebanyak 34/100 Rumah Sakit telah dilakukan HRR (data per tanggal 24 Januari 2019).
- Sebanyak 238 penumpang yang datang dari atau berangkat ke Filipina telah mendapatkan vaksinasi IPV di provinsi Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Sulawesi Selatan di tahun 2019.
- Pertemuan koordinasi dengan petugas imunisasi telah dilakukan di Puskesmas Bahari Berkesan, Dinkes Kota Ternate, Maluku Utara pada tanggal 18 Januari 2020 untuk memverifikasi dan membuat analisis data.
- Pertemuan koordinasi dengan petugas Gudang farmasi Dinkes provinsi Maluku Utara terkait ketersediaan vaksin di 6 Kabupaten yaitu Ternate, Morotai, Sula, Taliabi dan Halmahera Selatan) pada tanggal 14 Januari 2020. Ketersediaan vaksin cukup sampai dengan 3 bulan ke depan.
- Sosialisasi terkait surveilans AFP dan Imunisasi rutin untuk kader telah dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2020 di Puskesmas Yaba, Kab Halmahera Selatan, Maluku Utara.



Kiri dan kanan atas: Vaksinasi polio untuk penumpang yang akan berangkat ke Malaysia dilakukan di KKP Makassar. Kredit: Yurniati/WHO Indonesia.
Kanan bawah: Verifikasi dan analisis data oleh petugas Imunisasi Puskesmas Bahari Berkesan, kota Ternate. Kredit: Hermansyah/WHO Indonesia.

Ringkasan Surveilans

- Pada tahun 2019, angka NP AFP sebesar **2.14** dengan spesimen adekuat sebesar **80.1%**. Sembilan dari 34 provinsi telah mencapai kedua indikator utama untuk surveilans AFP: >2 atau lebih banyak kasus AFP bukan polio (NP AFP) per 100.000 anak di bawah usia 15 tahun dan > 80% kasus AFP dengan spesimen yang adekuat.
- Pada minggu ke 03 tahun 2020, angka NP AFP tahunan Indonesia adalah **0.00** dengan spesimen adekuat sebesar **100%**.
- Pada minggu ke 03 tahun 2020, provinsi Papua memiliki tingkat NP AFP tahunan sebesar **0.00** spesimen adekuat sebesar **100%** sedangkan di Papua Barat memiliki tingkat NP AFP tahunan sebesar **0.00** dengan spesimen adekuat sebesar **0.00%**.
- Surveilans aktif dan pelaporan kasus AFP terus meningkat di kedua provinsi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, di kedua provinsi tersebut masih menghadapi tantangan dalam hal pelaporan dan investigasi kasus yang tepat waktu, peningkatan pengumpulan spesimen yang tepat waktu dan memadai adalah prioritas bagi kedua provinsi tersebut.
- Ulasan Rekam Rumah Sakit (HRR) di 12 provinsi berisiko tinggi terus berlanjut. Rumah sakit yang telah dilakukan HRR di tahun 2019 sebanyak 35/35 RS di Papua, dan 19/19 RS di Papua Barat,

No	District	NP AFP Rate			NP AFP Rate Comparing with last 2 year	Adequate Specimen		
		2017	2018	2019	2019	2017	2018	2019
1	Asmat	0.0	2.00	5.64	↑	0.0	0.0	0.0
2	Biak Numfor	0.0	0.0	6.85	↑	0.0	0.0	50.0
3	Boven Digoel	0.0	0.0	4.66	↑	0.0	0.0	100.0
4	Deiyai	0.0	0.0	8.79	↑	0.0	0.0	0.0
5	Dogiyai	2.00	0.0	0.0	↓	0.0	0.0	0.0
6	Intan Jaya	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0
7	Jayapura	0.0	2.00	14.04	↑	0.0	0.0	57.1
8	Jayawijaya	10.00	8.00	3.62	↓	80.0	75.0	0.0
9	Keerom	0.0	2.00	0.0	↓	0.0	0.0	0.0
10	Kota Jayapura	4.00	6.00	14.16	↑	100.0	100.0	60.0
11	Lanny Jaya	0.0	2.00	5.48	↑	0.0	50.0	50.0
12	Mamberamo Raya	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	100.0
13	Mamberamo Tengah	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0
14	Mappi	2.00	0.0	2.72	↑	0.0	0.0	0.0
15	Merauke	2.00	6.00	6.59	↑	100.0	100.0	50.0
16	Mimika	12.00	10.00	9.97	↓	16.6	60.0	100.0
17	Nabire	2.00	4.00	10.02	↑	100.0	100.0	75.0
18	Nduga	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0
19	Paniai	0.0	0.0	1.88	↑	0.0	0.0	100.0
20	Pegunungan Bintang	0.0	0.0	8.17	↑	0.0	0.0	100.0
21	Puncak	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0
22	Puncak Jaya	0.0	0.0	3.17	↑	0.0	0.0	0.0
23	Sarmi	0.0	2.00	0.0	↓	0.0	100.0	0.0
24	Supiori	0.0	0.0	14.35	↑	0.0	0.0	0.0
25	Tolikara	2.00	0.0	0.0	↓	100.0	0.0	0.0
26	Waropen	0.0	0.0	31.62	↑	0.0	0.0	33.3
27	Yahukimo	0.0	8.00	11.81	↑	0.0	25.0	62.5
28	Yalimo	0.0	0.0	11.40	↑	0.0	0.0	100.0
29	Yapen	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0
Papua		1.80	2.60	6.44	↑	55.0	65.3	59.3
1	Fakfak	0.0	0.0	12.56	↑	0.0	0.0	33.3
2	Kaimana	0.0	0.0	5.18	↑	0.0	0.0	100.0
3	Kota Sorong	0.0	2.00	9.75	↑	0.0	0.0	57.1
4	Manokwari	2.00	2.00	10.23	↑	0.0	0.0	60.0
5	Manokwari Selatan	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0
6	Maybrat	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0
7	Pegunungan Arfak	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0
8	Raja Ampat	0.0	0.0	6.25	↑	0.0	0.0	0.0
9	Sorong	0.0	0.0	3.77	↑	0.0	0.0	0.0
10	Sorong Selatan	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0
11	Tambrawa	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0
12	Teluk Bintuni	0.0	2.00	10.17	↑	0.0	0.0	50.0
13	Teluk Wondama	0.0	0.0	8.93	↑	0.0	0.0	100.0
West Papua		0.3	1.00	7.36	↑	0.0	0.0	54.5

	NP AFP Rate <1 or Adequate Specimen <60%
	NP AFP Rate 1-1,9 or Adequate Specimen 60-79%
	NP AFP Rate >=2 or Adequate Specimen >=80%

Mobilisasi Dukungan yang Mendukung

Kementerian Kesehatan

- Kementerian Kesehatan Indonesia terus mengerahkan para pakar senior ke Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mendukung perencanaan, pemantauan, koordinasi, dan evaluasi kegiatan tanggap KLB polio.
- Telah dikeluarkannya surat edaran mengenai prosedur imunisasi IPV pada anak usia 4-36 bulan yang belum pernah mendapatkan imunisasi IPV serta cara pencatatan dan pelaporan.
- Direktorat Jenderal telah mengeluarkan surat edaran mengenai instruksi untuk memastikan vaksinasi polio dari wisatawan yang datang dari atau ke Filipina sebagai upaya mencegah terjadinya transmisi cVDPV 1 dan 2 di Filipina ke semua provinsi pada bulan September 2019.
- Direktorat Jenderal telah mengeluarkan surat edaran mengenai instruksi untuk memastikan vaksinasi polio dari wisatawan yang datang dari atau ke Malaysia sebagai upaya mencegah terjadinya transmisi cVDPV 1 di Malaysia ke semua provinsi pada bulan Desember 2019.

WHO

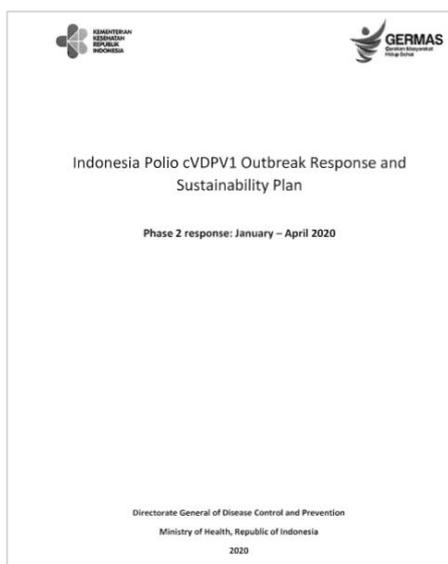
- WHO telah membuka kantor cabang di Jayapura, Provinsi Papua dan merekrut 10 konsultan nasional untuk mendukung kegiatan di Papua dan Papua Barat. Para staf ini telah ditempatkan ke kabupaten-kabupaten berisiko tinggi untuk bekerja langsung dengan dinas kesehatan tingkat kabupaten.
- Dikarenakan isu keamanan di Papua dan transmisi KLB polio yang baru-baru ini terjadi di Filipina dan Malaysia, 2 konsultan nasional telah ditempatkan ke provinsi yang berbatasan dengan Filipina yaitu Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Seorang konsultan telah ditempatkan ke Sulawesi Selatan yang sering dilalui oleh pelayaran internasional. Selain itu, dua konsultan nasional juga ditempatkan ke Manokwari, Papua Barat dan Merauke, Papua. Tujuannya adalah untuk membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas imunisasi rutin dan surveilans AFP.
- Dua data asisten tambahan telah bergabung dengan tim polio WHO, satu ditempatkan ke Jayapura dan satu lagi ke kantor Jakarta untuk memperkuat analisis data dan pengambilan keputusan berdasarkan bukti.

UNICEF

UNICEF saat ini bekerja di kantor cabang yang didirikan di Jayapura (Papua) dan Manokwari (Papua Barat) di mana 8 staf tetap dan 6 konsultan mendukung kegiatan tanggap KLB polio. Bersamaan dengan ini, 4 (empat) LSM memberikan dukungan berkelanjutan untuk bantuan teknis dan mobilisasi sosial dengan fokus pada daerah berisiko tinggi. Baru-baru ini, dua mitra LSM di Papua (GAPAI dan YP2KP) telah merekrut 22 petugas lapangan yang telah ditempatkan di 12 kabupaten dataran tinggi di Papua. Petugas lapangan akan bertanggung jawab dalam membantu kabupaten untuk mencapai cakupan 95%, mengembangkan strategi mobilisasi sosial yang sesuai dengan daerah, meningkatkan efektivitas vaksin dan manajemen rantai dingin, dan melakukan RCA fokus utama untuk tahun 2020 adalah memperkuat layanan imunisasi rutin.

Lainnya

- Rotary terus menyediakan kaos, topi, pin, buku, dan bahan KIE lainnya ke banyak kabupaten di provinsi Papua.
- Relawan Palang Merah telah memberikan dukungan untuk tanggap KLB polio di Jayapura baik sebagai pemberi vaksin maupun penggerak masyarakat.
- Kantor CDC Indonesia telah memperkuat dukungan untuk operasi tanggap KLB polio melalui Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI). Sembilan titik fokus Kab/Kota sekarang sudah ada dan telah secara aktif mendukung HRR dan Penilaian Kesiapan Sederhana.



Kiri: Dokumen rencana tanggap dan keberlanjutan terhadap KLB cVDPV1 fase kedua (Januari - April 2020) telah ditandatangani oleh Dirjen P2P Kemenkes. Kanan : Staf Ahli Menteri Kemenkes, dr Slamet mendukung pelaksanaan tanggap polio KLB.

Koordinasi

- Kementerian Kesehatan terus memimpin dan mengoordinasikan dukungan pemerintah dan mitra untuk semua kegiatan tanggap KLB polio. Pertemuan mingguan di tingkat nasional dan provinsi membantu untuk mengoordinasikan kegiatan dan memantau pelaksanaan rencana tanggap KLB polio di tingkat lokal.
- Perwakilan senior Menteri Kesehatan (Penasihat Menteri Kesehatan) telah ditunjuk untuk secara langsung mendukung tanggap KLB polio Indonesia dan melakukan perjalanan mingguan ke Jayapura, Papua untuk bekerja melalui masalah isu anggaran dan operasional.
- Berbagai upaya sedang berlangsung untuk memaksimalkan dukungan dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Kementerian Dalam Negeri yang secara aktif bekerja untuk memastikan semua respons pemerintah terhadap wabah.
- Pusat Operasi Darurat Kesehatan Masyarakat (PHEOC) yang bertempat di DKP Jayapura, telah didirikan dan beroperasi penuh.
- Konferensi video bersama WHO/UNICEF antara tim nasional dan provinsi dari Papua dan Papua Barat terus diadakan setiap minggu.
- Pertemuan mitra polio, yang dipimpin oleh WHO, dilakukan setiap 2 (dua) minggu. Terakhir adalah pertemuan ke 31 pada 16 Januari 2020.
- Rotary International dan IFRC / PMI terus memberikan dukungan yang berharga dalam memobilisasi komunitas lokal yang bekerja dengan LSM lokal dan kelompok gereja untuk menyadarkan dan membangun permintaan untuk vaksinasi polio.

Langkah Selanjutnya

- Kemenkes RI dan Dinas Kesehatan Provinsi dengan dukungan mitra akan terus melakukan monitoring terkait kegiatan tanggap KLB polio putaran ke-2 dan surveilans AFP untuk mencapai standar indikator.
- Kemenkes dan DKP akan mendukung para mitra untuk meningkatkan pengawasan terhadap kemajuan cakupan Sub PIN putaran 2 di Papua dan untuk memastikan target indikator surveilans AFP terpenuhi.
- Pot spesimen tambahan, poster AFP, dan folder advokasi polio telah didistribusikan ke semua kabupaten di Papua/Papua Barat dan juga ke semua provinsi berisiko tinggi di Indonesia.
- Penilaian terkait *Effective Vaccine Management* (EVM) akan dilakukan pada tanggal 27 Januari- 7 Februari 2020.
- Penilaian program Imunisasi dan surveilans PD3I akan dilakukan pada tanggal 7-19 Februari 2020 di 15 provinsi terpilih.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Direktorat Surveilans dan Karantina. Email: poskoklb@yahoo.com
+62 877 7759 1097

#PHEOCIndonesia
+62878 0678 3906

WHO Indonesia

Dr Vinod Bura, Global Polio Eradication Coordinator. Email: burav@who.int
+62 812 8118 7429

UNICEF Indonesia

Dr Paul Pronyk, Chief, Child Survival & Development. Email: ppronyk@unicef.org



Kiri : Kegiatan monev KLB cVDPV1 telah dilakukan di provinsi Papua yang dipimpin oleh Dirjen P2P. Kredit: Mindo/WHO Indonesia. Kanan: Simulasi surveilans AFP untuk mengisi form FP1, KU 60 dan penanganan specimen serta pengirimannya ke Dinkes Kab/Kota pada saat pelatihan di Dinkes provinsi Papua Barat. Kredit: Aning/ WHO Indonesia.